

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Beragam alasan yang mendasari dosen dan mahasiswa ini bergerak menolak Rancangan UU KPK tersebut. Pada intinya mereka menilai kalau revisi UU tersebut hanyalah menguntungkan elit semata. Sama sekali tidak menguntungkan masyarakat luas. Yang diuntungkan hanyalah elit pemerintah, koruptor, oligarki, dan orang-orang yang mempunyai niat buruk untuk melakukan tindak korupsi. Hal inilah yang membuat masyarakat bergerak menolak adanya revisi terhadap UU KPK tersebut.

Tidak memihaknya RUU tersebut dapat dilihat dari draft yang beredar. Ada berbagai poin yang sama sekali tidak dapat memperkuat keberadaan KPK melainkan akan melemahkan KPK itu sendiri. Pelemahan inilah yang akan memperburuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga pelemahan ini menjadi bertolak belakang dengan komitmen perjuangan reformasi 1998, yang mana pemberantasan korupsi menjadi satu diantara nilai yang disepakati saat itu. Untuk itu dosen dan mahasiswa bergerak bersama. Alasan inilah yang mendasari penolakan dari dosen dan mahasiswa serta masyarakat umum lainnya. Dosen dan mahasiswa memiliki *concern* isu yang sama terhadap pencegahan korupsi.

Dalam hal aliansi peran yang terbangun, pada dasarnya peran dosen dan mahasiswa sangatlah berbeda. Namun mereka masih satu kesatuan yang saling melengkapi. Mahasiswa tetap menjadi aktor utama dalam gerakan penolakan tersebut. Beberapa hal yang dilakukan oleh mahasiswa adalah peran-peran teknis seperti menjadi perangkat aksi, menggalang massa, melakukan framing media,

menyusun strategi, dan menyusun kajian. Untuk para dosen mereka terlibat sebagai aktor pendukung. Untuk peran dosen/akademisi dalam gerakan penolakan RUU KPK 2019 yang lalu adalah sebagai berikut: melawan berita bohong seputar aksi, membangun jaringan massa aksi, dukungan moril kepada mahasiswa dan massa aksi, teman diskusi massa aksi, sumber informasi, dan membantu pendanaan secara sukarela, mengorganisir massa yang tidak punya blok, menggeser jam kuliah atau mengganti jam kuliah tersebut, memberikan *statement* di media, dan turut hadir ke jalan bersama massa aksi sebagai representasi fisik.

Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ini menunjukkan perlawanan terhadap negara. Dosen dan mahasiswa adalah bagian dari kaum intelektual. Yang mana mereka memiliki sebuah keistimewaan dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Kaum intelektual ini wujud dari kaum epistemik yang mana biasanya memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan. Namun dalam gerakan penolakan tersebut kaum epistemik ini bergerak bersama melawan negara.

Terjadinya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa bukan semerta-merta terjadi begitu saja. Terjadinya kolaborasi ini adalah wujud dari terbangunnya solidaritas sosial antara dosen dan mahasiswa. Yang mana bermula dari kesadaran individu terhadap keadaan atau kondisi sosial yang ada sehingga berubah menjadi kesadaran kolektif sebagai warga negara. Pada akhirnya membentuk sebuah solidaritas sosial yang mana berwujud gerakan sosial dalam melawan kebijakan negara.

Dari apa yang ditemukan di atas, penelitian ini masih banyak kekurangannya. Perlu diakui bahwa dengan keterbatasan waktu dan kemampuan

dalam menyelesaikan penelitian ini, ada bagian yang penting dan belum diuraikan secara mendalam dalam penelitian ini. Penelitian ini belum mampu untuk mengulas lebih mendalam mengenai hubungan kekuasaan dan kaum intelektual pasca reformasi.

5.2. Saran

Setelah penelitian ini selesai, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Saran tersebut ditujukan untuk memperkaya khasanah keilmuan dan untuk aktivis gerakan sosial.

Dalam penelitian ini digambarkan bahwa gerakan sosial akan lebih massif dan terorganisir jika kaum intelektualnya juga bersuara dan terlibat, terkhususnya dalam gerakan sosial. Maka dari itu disarankan kepada seluruh aktivis gerakan sosial, LSM, mahasiswa, dan masyarakat secara umum untuk melibatkan akademisi/dosen untuk memperkuat gerakan sosial tersebut. Sehingga gerakan sosial itu akan lebih efektif dan didengar sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan.

Terakhir, untuk setiap peneliti yang berkenan meneliti dengan topik yang sama. Pada dasarnya penelitian ini masih jauh dari kata baik dan benar. Apalagi masih banyak kekurangan di dalamnya. Penelitian ini belum bisa mengulas secara lebih mendalam tentang kaum intelektual pasca reformasi. Untuk itu sekiranya dapat disempurnakan dengan baik kedepannya dan dapat semakin memperkaya khasanah keilmuan dan literatur tentang kaum intelektual di Indonesia.